

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu isu yang sering dialami oleh negara-negara di seluruh dunia adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Permasalahan ketimpangan pendapatan menjadi perhatian untuk segera diatasi di negara maju dan negara berkembang. Sebagaimana diketahui, bahwa pada agenda pembangunan global yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki tujuan memastikan adanya kesempatan yang sama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Wibowo & Pangestuty, 2023).

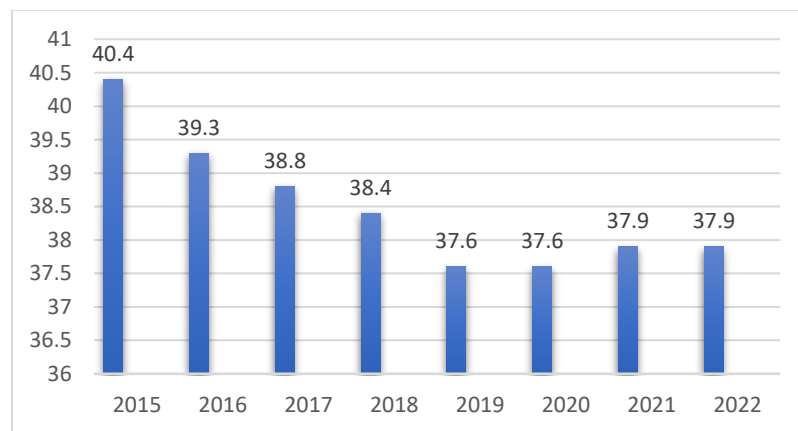
Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan yang tinggi antar wilayah dapat membawa dampak buruk untuk kestabilan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu diupayakan berbagai kebijakan agar ketimpangan yang terjadi tidak terlalu mencolok. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit karena adanya *trade off* antara ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi (Anshari & Azhar, 2018).

Pembangunan ekonomi biasanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi, pembangunan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, hal ini dilihat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh masalah perkembangan pendapatan nasional rill akan tetapi dapat

dipengaruhi oleh modernisasi kegiatan ekonomi. Selain itu, terdapat perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yakni dalam pembangunan ekonomi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan perkapita (Arsyad, 2010).

Ketimpangan ini dapat memiliki dampak yang relevan bagi kemajuan pembangunan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia diukur menggunakan indikator *Gini Ratio*. Menurut Badan Pusat Statistik dalam mengukur pendapatan yang terjadi masyarakat dilihat menggunakan *gini ratio*.

Data mengenai ketimpangan pendapatan Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: World Bank, 2023.

### **Gambar 1.1 *Gini Ratio* di Indonesia Tahun 2015-2022 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.1 data 8 tahun terakhir yang bersumber dari *World Bank*, *Gini ratio* pada tahun 2015-2019 tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai ketimpangan

pendapatan secara agregat dimana nilainya semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 *Gini ratio* Indonesia sebesar 40,4% dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai angka 37,6%, namun pada masa pandemi tahun 2020-2022 kembali meningkat hingga mencapai angka 37,9% hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan menurun karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan diadakannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *lockdown* sehingga di beberapa perusahaan menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan untuk sekolah menerapkan pembelajaran berbasis *online*. Atas kebijakan tersebut berdampak pada sektor pendidikan seperti putusnya sekolah dan sektor ekonomi seperti menurunnya pendapatan, termasuk meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengatasinya, namun hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan program tersebut dengan tidak baik seperti memangkas anggaran bansos.

Adapun teori terkait permasalahan dari variabel yang diteliti yaitu pandangan Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antar wilayah akan menurun. Hal tersebut karena pada

waktu proses pembangunan baru dimulai, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik.

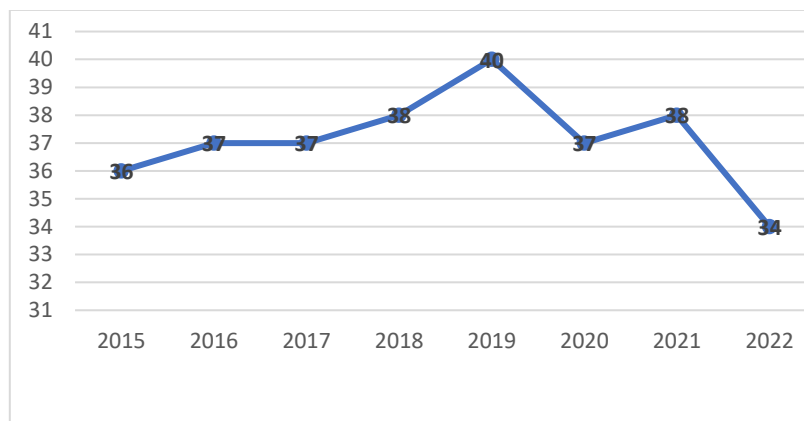
Teori *human capital* merupakan teori yang memperhitungkan bahwa investasi dalam dunia pendidikan dapat memperbaiki kualitas produktivitas masyarakat, kemampuan masyarakat yang semakin baik. Dengan adanya pendidikan maka seseorang mampu keluar dari lingkungan kemiskinan. Indikator tingkat pendidikan suatu wilayah dapat diukur dari rata-rata lama sekolah.

Teori Walt Rostow tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menyajikan suatu pandangan evolusioner terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam pandangannya, terdapat lima tahap yang mencakup transformasi dari masyarakat tradisional hingga masyarakat konsumsi massal. Meskipun teori ini tidak secara langsung membahas pengeluaran pemerintah, Rostow memberikan perhatian terhadap peran sektor publik dalam setiap tahap pertumbuhan. Pada awalnya, pada tahap tradisional, pengeluaran pemerintah cenderung terbatas dan bersifat tradisional. Namun, seiring dengan berkembangnya perekonomian, Rostow mengimplikasikan bahwa pemerintah perlahan-lahan akan meningkatkan perannya, terutama dalam mendukung sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahap-tahap berikutnya, pemerintah diharapkan terlibat dalam upaya redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan sosial untuk mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurut Andiani, secara mendunia, korupsi sudah disepakati sebagai tindak pidana yang menjadi musuh dan penyakit bagi seluruh bangsa di seluruh negara di

dunia. Korupsi tidak mengenal negara maju maupun negara miskin, karena korupsi sudah tumbuh dan mengakar bahkan menjadi budaya hampir di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin (Yaldi et al., 2021).

*Transparency International* adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) digunakan untuk mengukur tingkat korupsi dalam suatu negara. IPK menggunakan skala 0 hingga 100, dimana semakin tinggi nilainya, semakin rendah tingkat korupsinya. Berikut ini merupakan data IPK di Indonesia selama tahun 2015-2022 dapat terlihat di gambar 1.2.



Sumber: *Transparency International*, 2023.

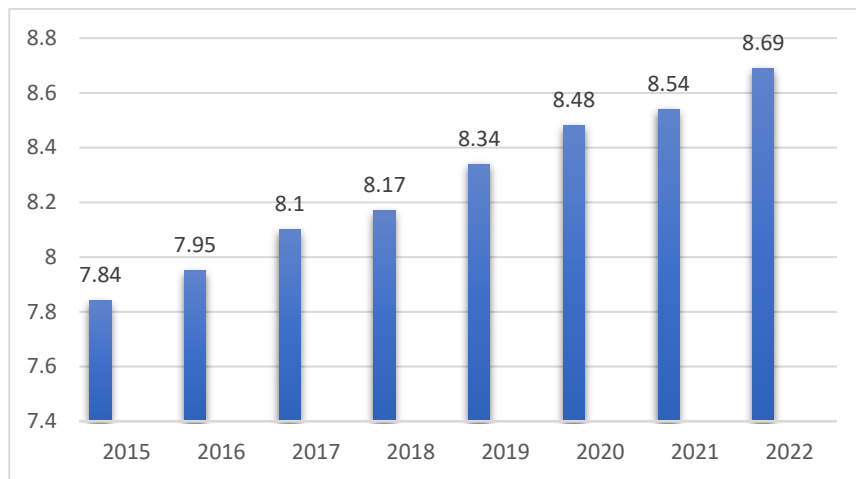
**Gambar 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia Tahun 2015-2022 (Indeks)**

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas, merupakan indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam periode 2015-2022 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat

disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya fluktuasi, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, efektivitas penegak hukum, kondisi ekonomi, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil, serta adanya perubahan metodologi dalam penghitungan indeks tersebut oleh *transparency international*. Perubahan ini menciptakan variasi dalam penilaian persepsi korupsi di berbagai negara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Indonesia mencatat skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang menunjukkan penurunan dari skor 38 pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun tersebut disebabkan oleh kinerja pemerintah dalam melawan korupsi belum optimal, seperti yang dimuat di website resmi *Transparency Internasional Indonesia*, per tanggal 31 Januari 2023, menurut Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia*, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Dewi et al., (2016), tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah (Swastika & Arifin, 2023). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku

secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Berikut ini merupakan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia selama tahun 2015-2022 dapat terlihat di gambar 1.3.

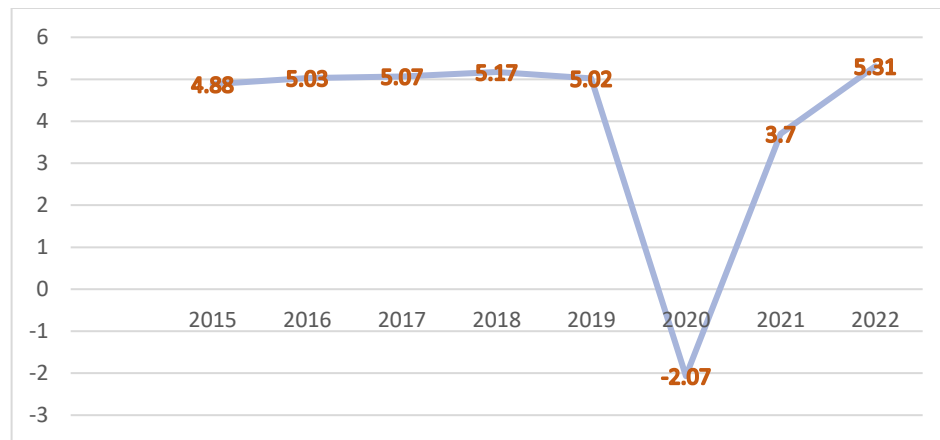


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

**Gambar 1. 3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia Tahun 2015-2022 (Tahun)**

Pada gambar 1.3 di atas, terlihat angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2015-2022 mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut karena pendidikan memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan tingkat penghasilan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, rata-rata lama sekolah juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, yang kemudian berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu laju pertumbuhan ekonomi, dimana dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Menurut Todaro (1998), peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Berikut ini merupakan data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia selama tahun 2015-2022 dapat terlihat di gambar 1.4.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

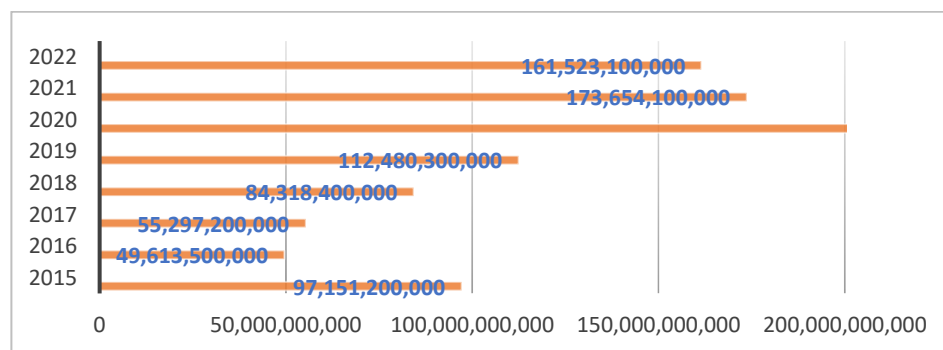
**Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2015-2022 (Persen)**

Gambar 1.4 di atas, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2015-2022 di atas menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami fluktuasi hal tersebut dapat disebabkan sejumlah faktor termasuk perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan dalam negeri, dan gejolak pasar. Selain itu, situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga sangat berdampak, hal tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi nasional dengan PDB mencapai angka -2,07%, karena situasi pandemi Covid-19 yang



membatasi pergerakan dunia usaha, yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk produksi dan konsumsi. Namun pada tahun berikutnya mulai kembali meningkat, dimana perekonomian Indonesia telah menunjukkan pulih dengan pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,7% dan naik pada tahun 2022 mencapai angka 5,31%.

Bansos (bantuan sosial) merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai instrumen negara. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bansos adalah program yang sudah dianggarkan dalam APBN, dan proses perencanaannya sudah dibahas dan diputuskan bersama oleh semua partai di Dewan Perwakilan. Oleh karena itu, bansos dapat dikategorikan sebagai instrumen negara. Berikut ini merupakan data Belanja Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia selama tahun 2015-2022 dapat terlihat di gambar 1.5.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024.

**Gambar 1. 5 Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) di Indonesia Tahun 2015-2022 (Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 tingkat bantuan sosial di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi yang meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program BANSOS untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk dampak putus sekolah akibat menurunnya pendapatan. Namun pada tahun 2022 tingkat bantuan sosial di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan tingkat belanja bantuan sosial disebabkan oleh menurunnya dampak pandemi Covid-19 dan tingginya belanja bantuan sosial pada tahun 2021. Menurunnya belanja bantuan sosial juga dapat disebabkan oleh fokus pemerintah pada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan cadangan bencana yang mendapat alokasi yang berpengaruh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Kemudian penurunan belanja bantuan sosial juga dapat disebabkan oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial, yang mungkin menghasilkan pendekatan belanja bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan selektif. Adanya pengalokasian belanja bantuan sosial yang diarahkan sebagaimana mestinya diharapkan bisa mengurangi maupun menurunkan terjadinya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di suatu daerah (Raynal & Heri, 2020).

Dengan demikian pembahasan tentang sebab-sebab ketimpangan pendapatan atau variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Hasil penelitian Royan et al. (2019) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam persentase yang didapat dari peningkatan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, penelitian seringkali memperoleh hasil yang berbeda pada tempat, waktu, dan sasaran penelitian yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wayuni & Adriyani (2022), yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi negatif tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sholikhah & Imaningsih (2022) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fenomena tentang adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat di Indonesia ini membuat penulis mempunyai keinginan untuk menulis penelitian ini. Hal yang baru (*novelty*) dalam penelitian ini adalah terdapat variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Bantuan Sosial (BANSOS) yang digunakan untuk membedakan periode pengamatan sebelum dan saat terjadinya krisis ekonomi di periode tersebut, yang mana pada penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai variabel tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan ini peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Rata-Rata Lama Sekolah, Laju

Pertumbuhan Ekonomi, dan Bantuan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2022”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2022?
2. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2000-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan.

### **2. Bagi Pemerintah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan.

### **3. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, bahan informasi, serta sumber data bagi akademisi lainnya sebagai penunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi dan literatur mengenai ketimpangan pendapatan dan hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan pada penelitian tahap selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan Kementerian Keuangan.

